

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan karakteristik yang berbeda dan keragaman yang tinggi antar daerah. Perbedaan tersebut meliputi sumber daya alam, ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat, jumlah dan kepadatan penduduk, kualitas sumber daya manusia, letak geografis, serta sarana dan prasarana yang tersedia di setiap daerah. Hal ini akan memengaruhi kemampuan daerah untuk tumbuh, memungkinkan beberapa daerah untuk tumbuh lebih cepat dari yang lain, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah.

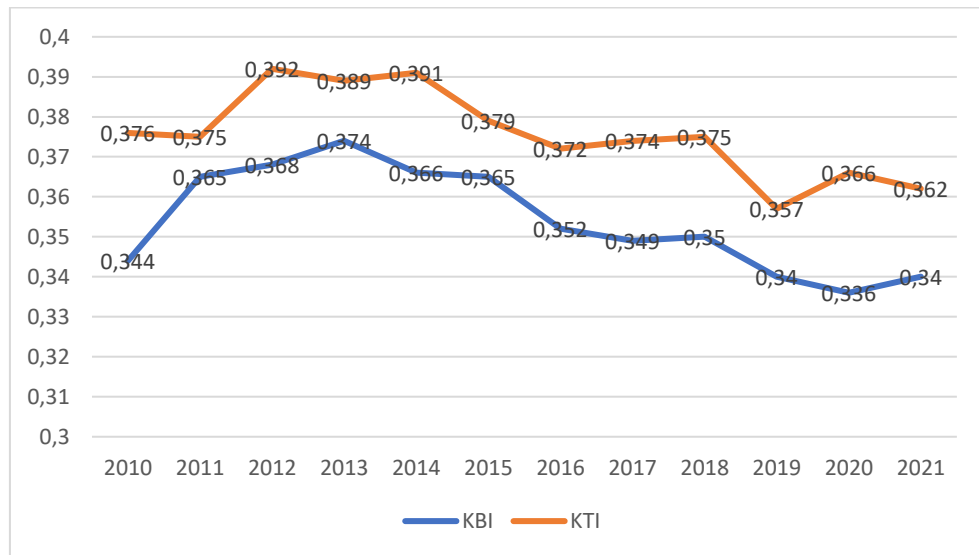
Pembangunan di Indonesia terus berlangsung, kebijakan pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang terlihat pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Namun hasil pembangunan terkadang terasa tidak merata dan masih terdapat ketimpangan (Fauza, 2019)

Ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena kebijakan redistribusi pendapatan akibat ketimpangan tentunya akan memakan biaya yang besar. Todaro (2004) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan mempunyai dua dampak terhadap pembangunan perekonomian

daerah, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari ketimpangan adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas dan solidaritas sosial dan ketimpangan

yang tinggi akan dianggap tidak adil. Dampak positifnya adalah merangsang atau mendorong daerah lain untuk bersaing dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

Jika diklasifikasikan berdasarkan kawasan, maka daerah di Indonesia dibagi menjadi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Terdapat perbedaan pembangunan yang sangat mencolok antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) karena perencanaan dan pengendalian terpusat yang berlangsung bertahun-tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (2022) indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan yaitu indeks gini yang memiliki nilai 0 sampai 1. Jika indeks gini mendekati 1 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah, tetapi apabila nilai indeks gini 0,35 sampai 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang, serta jika nilai indeks gini lebih dari 0,5 berarti ketimpangannya tinggi. Untuk melihat nilai rasio gini di Indonesia berdasarkan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia pada kurun waktu 2010-2021, dapat dilihat pada gambar 1.1.

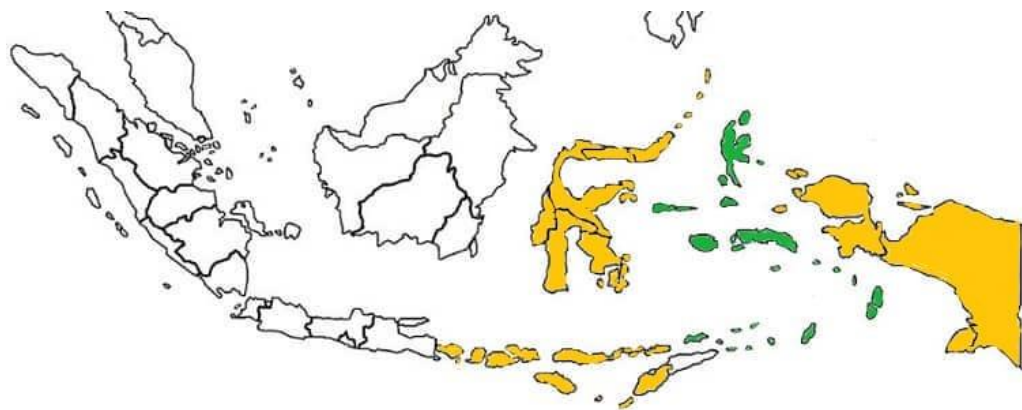


Sumber: *bps.go.id*, 2022




Gambar 1. 1 Indeks Gini di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2021 Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia lebih tinggi dibandingkan Kawasan Barat Indonesia. Daerah di wilayah Kawasan Barat Indonesia dinggap lebih maju karena relatif lebih cepat berkembang dibandingkan Kawasan Timur Indonesia yang dianggap daerah tertinggal. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan wilayah, perbedaan sumber daya manusia, keadaan geografis merupakan penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan, sehingga akan terciptanya wilayah yang maju akan semakin maju dan yang tertinggal akan semakin tertinggal. Kesenjangan terjadi dapat bermula dari perbedaan pembangunan antar wilayah, seperti halnya perbedaan infrastruktur dari mulai kondisi jalan, kesehatan, pemukiman, perumahan dan lain-lain.

Kawasan Timur Indonesia memiliki berbagai keunggulan seperti sumber daya alam yang melimpah dan potensial untuk menjadi kekuatan ekonomi baik pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Namun sumber daya manusia yang tersedia di daerah ini sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menggali potensi yang ada, inilah yang disebut “kaya tetapi miskin”, artinya bahwa sumber daya alamnya sangat berpotensi tetapi pengolahannya masih sangat minim atau belum optimal (Rizqullah, 2021). Perlu adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, namun tetap menjaga kesempatan bertumbuhnya daerah Kawasan Barat Indonesia. Dengan adanya dikotomi kawasan pembangunan semacam itu, seringkali terjadi pembagian atas dasar aspek daerah seperti Kawasan Barat Indonesia yang dianggap daerah maju dan Kawasan Timur Indonesia daerah yang kurang bertumbuh atau masih tertinggal. Sejarah dunia menunjukkan bahwa wilayah yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan keuangan yang lengkap dengan segala pendukungnya secara alami dapat menarik kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dan menjadi magnet bagi pembangunan dan kegiatan sosial (Tambunan, 2018). Oleh karena itu, kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah menjadi salah satu permasalahan perekonomian Indonesia yang belum terselesaikan sampai sekarang. Berikut ini peta ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2021:



Legenda

	: 0,20-0,35
	: 0,36-0,49
	: 0,50-0,70

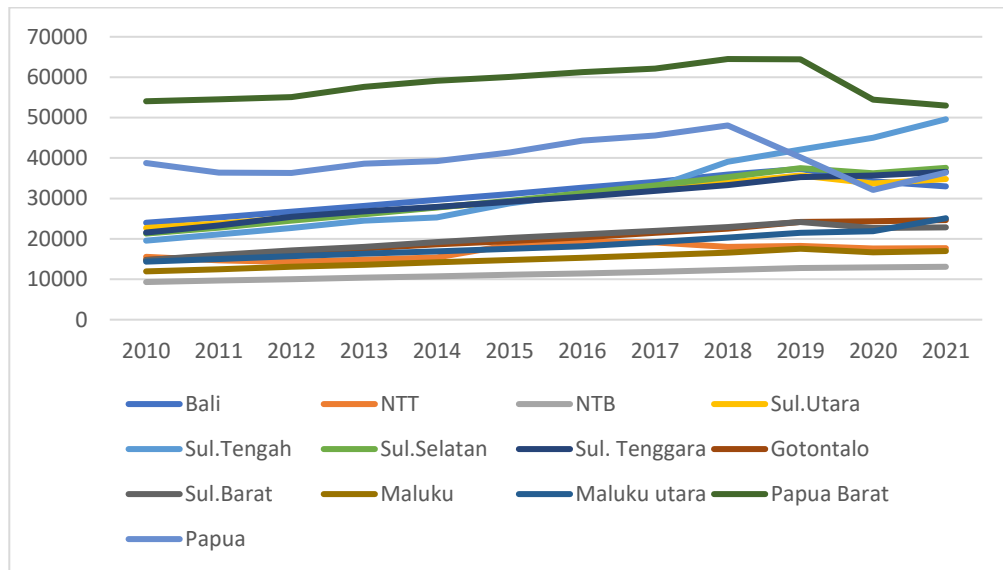
Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 1. 2 Peta Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia

Ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan indeks gini di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2010-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Ketimpangan berada pada rerata indeks gini nya sekitar 0,316-0,422. Gradasi warna merah menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Gradasi warna kuning menunjukkan tingkat ketimpangan sedang, pada kategori ini Provinsi dengan ketimpangan tertinggi berada di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi selatan dengan nilai reratanya sebesar 0,422 dan 0,408. Mayoritas provinsi di Kawasan Timur Indonesia memiliki kategori ketimpangan sedang, akan tetapi provinsi Maluku Utara dan Maluku memiliki tingkat ketimpangan rendah yaitu sebesar 0,316 dan 0,347 yang ditunjukkan dengan gradasi warna hijau.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi juga kesejahteraan masyarakatnya, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang cepat juga dapat menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata karena tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Kawasan Barat Indonesia masih mendominasi struktur ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 80%. Sementara itu, kontribusi Kawasan Timur Indonesia terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 20%. Sedangkan PDRB Per Kapita adalah bagian parameter kemakmuran masyarakat suatu daerah yang selalu menjadi pengamatan penting. PDRB per kapita daerah di KAWASAN TIMUR INDONESIA setiap tahun mengalami peningkatan, namun menurun pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Berikut ini data PDRB Perkapita ADHK 2010 Provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia periode tahun 2010-2021:



Sumber: Statistik Indonesia, 2022

Gambar 1. 3 PDRB Per Kapita ADHK 2010 di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2010-2021

Berdasarkan gambar 1.2 data PDRB per kapita 13 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2021 mempunyai nilai yang cukup bervariasi. Pada tahun 2010-2019 nilai PDRB Perkapitanya cenderung mengalami kenaikan, Meski demikian beberapa provinsi tetap mengalami kenaikan ditengah pandemi covid-19, Adapun provinsi tersebut antara lain Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku Utara yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua cenderung mengalami fluktuasi dan terjadi penurunan. Nilai PDRB per kapita yang terbesar terdapat di Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 64.449 juta rupiah per orang pada 2018, disusul Provinsi Papua dengan nilai PDRB per kapita tertingginya pada tahun 2018

yaitu sebesar 48.069 juta rupiah, dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan PDRB perkapita sebesar 49.588 juta rupiah pada 2021. PDRB yang terkecil berada di Provinsi NTT yaitu sebesar 9.316 juta rupiah per orang pada 2010. Adanya perbedaan PDRB per kapita yang ada di setiap Provinsi di Kawasan Timur Indonesia tentunya mengindikasikan perbedaan pertumbuhan ekonomi yang ada. Nilai PDRB per kapita yang cukup bervariasi ini terjadi karena beberapa faktor yaitu sumber daya di setiap daerah, infrastruktur, Kebijakan- Kebijakan pemerintah yang di terapkan masing-masing daerah dan mungkin hal ini bisa terjadi di setiap provinsi yang ada di Indonesia.

Adapun Al-Qur'an memuat penjelasan tentang distribusi pendapatan, sehingga kekayaan tidak hanya milik orang-orang tertentu saja. Penjelasan ini ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Q.S Al-Hasyr 59:7).

Ada beberapa faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan daerah. Dalam penelitian Iswanto (2018) faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan terdiri dari inflasi, penduduk miskin, pengeluaran pemerintah, dan PDRB. Penelitian Masruri (2016) faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, IPM, TPAK, dan TPT. Penelitian Juliana dan Soelistyo (2019) faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan antara lain PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk, PAD, IPM dan UMK.

Mengingat besarnya dampak ketimpangan distribusi pendapatan, maka perlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghindari peningkatan ketimpangan ekonomi, pemerintah daerah memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dan memengaruhi ketimpangan pendapatan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul dalam penelitian tentang, **“Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2021?
2. Bagaimana pengaruh Presentase Penduduk Miskin terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2021?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2021?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2021?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2021.
2. Untuk mengetahui Presentase Penduduk Miskin terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010-2021.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis,

Penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu dari penelitian ini diharapkan penulis dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Kawasan Timur Indonesia.

2. Bidang ilmu pengetahuan

Diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi pada bidang ekonomi terutama mengenai ketimpangan distribusi pendapatan, serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah maupun instansi terkait daerah maupun nasional diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan pada proses pembangunan disetiap daerah, serta diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan strategi pembangunan yang tepat.